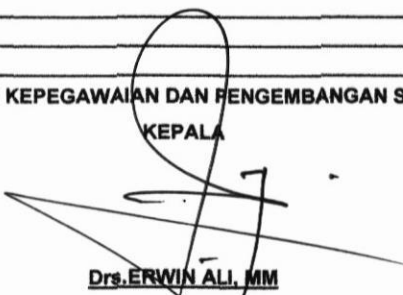




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Nomor SOP	800/ /BKPSDM-2017
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEPALA  Drs. ERWIN ALI, MM NIP. 196904241995011001
Nama SOP	Pengelolaan Seleksi Terbuka JPT Pratama

Dasar Hukum

- UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural
- PP No. 13 tahun 2002 tentang pembekuan PP 100 tahun 2000 ttg Pengangkatan PNS dlm Jabatan Struktural
- PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
- PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Kepres RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang Pangkat dan Tunjangan Struktural
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota

Kualifikasi pelaksana

1. Bupati
2. Sekretaris Daerah
3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
4. Asisten Pemerintahan
5. Kepala BKPSDM
6. Inspektorat
7. Sekretaris Baperjakat
8. Kabid. Mutasi dan Pengembangan SDM
9. Kasubid Mutasi dan Kepangkatan

Keterkaitan

SOP Pengelolaan Seleksi Terbuka JPT Pratama ini terkait dengan SOP Kenaikan Pangkat dan SOP Disiplin Pegawai,

Peralatan/perlengkapan

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Buku Agenda | 5. ATK |
| 2. Komputer | 6. Kursi |
| 3. ATK | 7. Meja |
| 4. Printer | 8. Filing Kabinet |

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Seleksi Terbuka JPT Pratama tidak terlaksana

Pencatatan dan pendataan

- Disposisi usulan oleh Sekretaris Pansel
- Fasilitas kelengkapan administratif calon Pejabat Sekretaris Pansel
- Rekomendasi ketua Pansel kepada Pembina Kepegawaian hal ini kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan
- Mengantarkan Rekomendasi Pelaksanaan Mutasi ke KASN
- Mendapatkan Rekomendasi dari KASN
- Penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural oleh Gubernur

[illegible]

[illegible]